

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Sedangkan pendapatan negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah (UU No. 18 tahun 2016). Pendapatan negara tidak hanya hak pemerintah pusat tetapi juga hak pemerintah daerah atau lebih dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 tahun 2014).

Indonesia memasuki era otonomi daerah setelah berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 32 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan anggaran untuk memenuhi kebutuhan setiap daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun dengan tujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (UU No. 23 tahun 2014). Salah satu sumber pendapatan daerah yang harus dioptimalkan adalah pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siahaan, 2005:15). PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (UU No. 23 tahun 2014). PAD digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang salah satu sumber terbesarnya berasal dari pajak daerah.

Pengertian pajak daerah berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 28 Tahun 2009, “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 menetapkan jenis pajak daerah di Indonesia yaitu pajak provinsi dan pajak

kaupaten/kota yang terdapat 16 pajak daerah yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota.

a. Pajak Provinsi

Adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (Provinsi). Pajak provinsi yang berlaku dan dipungut sampai saat ini adalah terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor,
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- 4) Pajak Air Permukaan, dan
- 5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/kota

Adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota). Jenis-jenis pajak tersebut adalah:

- 1) Pajak Hotel,
- 2) Pajak Restoran,
- 3) Pajak Hiburan,
- 4) Pajak Reklame,
- 5) Pajak Penerangan Jalan,
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- 7) Pajak Parkir,
- 8) Pajak Air Tanah,
- 9) Pajak Sarang Burung Walet,
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan berkembangnya sektor jasa dan pariwisata adalah pajak hotel. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009, “Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Potensi pariwisata yang indah menjadi salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel dari wisatawan yang berkunjung. Potensi tersebut tentunya dimanfaatkan di seluruh daerah di Indonesia, salah satunya Kota Kediri. Kota Kediri merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga sektor pariwisata dan beberapa sektor terkait, misal sektor perdagangan dan penyediaan jasa merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. Terdapat berbagai tempat wisata yang memiliki keindahan alam sehingga menjadi daya tarik wisatawan domestik untuk mengunjungi Kota Kediri seperti Simpang Lima Gumul, Goa Selomangleng, Gunung Klotok, Gunung Kelud, Taman Wisata Tirtoyoso, Taman Sekartaji, Kebun Bunga Matahari, Wisata Religi Pohsarang Bunda Maria, dan lain-lain.

Seiring berkembangnya potensi pariwisata di Kota Kediri yang menjadi daya tarik wisatawan, tentunya berpengaruh terhadap perkembangan sektor usaha lainnya seperti jasa perhotelan dan tentunya memberikan peluang bagi sektor jasa perhotelan dalam menyumbangkan penerimaan pajak hotel dengan semakin banyaknya wisatawan domestik yang berkunjung di Kota Kediri. Meningkatnya jumlah wisatawan yang menginap di Kota Kediri akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun.

Melihat beberapa sumber pendapatan dari sektor pajak daerah, dikaitkan dengan potensi yang dimiliki Kediri sebagai kota yang terus mengalami

perkembangan diberbagai sektor, yang salah satunya yaitu pariwisata. Semakin banyaknya hotel di Kediri sebagai salah satu pendukung pariwisata daerah membuat pajak hotel memiliki potensi dalam menyumbang pendapatan asli daerah Kediri. Berikut ini akan dicantumkan jumlah wajib pajak hotel yang terdapat di Kota Kediri.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Hotel Tahun 2013-2016

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2013	21
2	2014	21
3	2015	21
4	2016	61

Sumber: BPPKAD Kota Kediri (2017)

Melihat dari potensi jumlah Wajib Pajak yang ada, jumlah Wajib Pajak di Kota Kediri dari tahun 2013-2016 terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi setelah diberlakukannya pengenaan pajak atas rumah kos di Kota Kediri pada tahun 2015. Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya untuk menggali potensi dalam peningkatan pendapatan pajak hotel. Dibawah ini akan dicantumkan target dan realisasi pajak hotel 2013-2016.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Hotel 2013-2016

Pajak Hotel	2013		2014		2015		2016	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Hotel Bintang Empat	1.400.000.000	1.849.700.883	1.600.000.000	2.140.832.435	1.970.000.000	2.119.937.165	2.190.832.435	2.458.763.899
Hotel Bintang Dua	605.000.000	688.980.245	650.000.000	829.557.613	750.000.000	949.348.341	954.557.613	1.024.546.694
Hotel Bintang Satu	70.000.000	70.696.666	70.000.000	76.491.463	73.500.000	73.509.310	76.491.463	77.485.235
Hotel Melati Tiga	135.000.000	175.309.102	175.000.000	240.596.021	265.000.000	343.936.031	390.596.021	542.961.474
Jumlah	2.210.000.000	2.784.686.896	2.495.000.000	3.287.477.532	3.058.500.000	3.486.730.847	3.612.477.532	4.103.756.899

Sumber: BPPKAD Kota Kediri (2017)

Semakin meningkatnya jumlah Wajib Pajak Hotel maka tentunya pendapatan Pajak Hotel terus mengalami kenaikan selama empat tahun terakhir. Realisasi penerimaan pajak hotel setiap tahunnya juga melebihi target yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kediri. Melihat perkembangan pendapatan Pajak Hotel beberapa tahun belakangan ini, maka dapat dikatakan bahwa Pajak Hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilaksanakan suatu penelitian untuk mengetahui analisis potensi pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah Kota Kediri. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Analisis Potensi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah (Studi di Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diambil penelitian ini yaitu bagaimana potensi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah Kota Kediri tahun 2013-2016?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah Kota Kediri tahun 2013-2016.

D. Kontribusi Penelitian

Melalui penulisan ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan teoritis bagi penulis dan pembaca, memberikan sumbangan dalam bidang pajak daerah khusus pada pajak hotel, dapat menjadi referensi dan perbandingan selanjutnya dalam bidang perpajakan daerah.

2. Manfaat Secara Praktis

Memberikan sumbang saran pemikiran kepada mereka yang mempunyai kewenangan yaitu Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Pajak Hotel.

3. Manfaat Secara Empiris

Penulisan ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian mengenai Pajak Hotel yang pernah ada dan diharapkan dapat menjadi dasar dan pemicu bagi penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini penulis menyusun setiap pokok-pokok bahasan ke dalam beberapa bagian. Pembagian tersebut dimaksudkan guna mempermudah dalam penyusunan, penjabaran, dan perangkaian data-data yang disusun sehingga mencapai sasaran yang akan dituju serta dapat dimengerti dengan mudah oleh pembaca. Adapun susunan dan perincian-perincian bab-bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini lebih menjabarkan latar belakang yang menjadi permasalahan dan alasan untuk dilakukan penelitian, rumusan masalah singkat mengenai permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian yang akan dicapai melalui penelitian, kontribusi penelitian yang mendeskripsikan manfaat penelitian yang dilakukan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi deskripsi tinjauan penelitian sebelumnya yang sejenis dan dapat menjadi rujukan maupun referensi dalam penelitian ini, kajian pustaka yang memuat teori-teori maupun pendapat para ahli dari buku ilmiah dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan metode penelitian dan jenis penelitian yang akan dipakai, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran.